



PENGUATAN SISTEM KETENAGAKERJAAN KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT MELALUI PENYUSUNAN DAN IMPLEMENTASI RENCANA TENAGA KERJA DAERAH (RTKD) 2025–2029

Pahrul Idham Kaliky¹, Andiah Nurhaeny²

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Pattimura¹

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Pattimura²

e-mail: andiah.nurhaeny@gmail.com

Diterima: 23/12/2025; Direvisi: 29/12/2025; Diterbitkan: 7/1/2026

ABSTRAK

Pembangunan ketenagakerjaan di tingkat daerah merupakan elemen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di Kabupaten Seram Bagian Barat, capaian ketenagakerjaan yang relatif baik masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sistem informasi dan perencanaan ketenagakerjaan yang terintegrasi serta berbasis data. Kondisi tersebut berpotensi menghambat keberlanjutan pembangunan ketenagakerjaan apabila tidak ditangani secara sistematis. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini difokuskan pada penguatan sistem ketenagakerjaan daerah melalui pendampingan penyusunan dan implementasi Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) periode 2025–2029. Metode yang digunakan berupa pendampingan perencanaan kebijakan selama 90 hari kalender yang meliputi pengumpulan dan pengolahan data ketenagakerjaan, penyusunan proyeksi persediaan dan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan elastisitas pertumbuhan ekonomi, serta koordinasi lintas perangkat daerah. Hasil kegiatan menunjukkan terbentuknya basis data ketenagakerjaan yang terstruktur dan terintegrasi, tersusunnya proyeksi tenaga kerja jangka menengah, serta dirumuskannya arah kebijakan, strategi, dan program ketenagakerjaan yang lebih berbasis bukti. Selain itu, kegiatan ini turut meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memanfaatkan RTKD sebagai acuan pengambilan kebijakan. Secara keseluruhan, pengabdian ini menegaskan bahwa pendampingan perencanaan ketenagakerjaan berbasis data efektif dalam memperkuat tata kelola ketenagakerjaan daerah yang terarah, terukur, dan berkelanjutan, serta berpotensi direplikasi pada daerah dengan karakteristik serupa.

Kata Kunci: *Sistem Ketenagakerjaan, Pengabdian Kepada Masyarakat, Rencana Tenaga Kerja Daerah*

ABSTRACT

Regional labor development plays a crucial role in promoting economic growth and enhancing the quality of human resources. In West Seram Regency, relatively favorable labor conditions continue to face challenges related to the limited availability of integrated and data-driven labor information systems and planning frameworks. This situation may hinder the sustainability of labor development if not addressed through systematic interventions. This community service initiative focuses on strengthening the regional labor system through assistance in the preparation and implementation of the Regional Labor Plan (RTKD) for the 2025–2029 period. The approach involved policy planning assistance conducted over a 90-day period, encompassing the collection and processing of labor data, the projection of labor supply and demand based on economic growth elasticity, and cross-sectoral coordination among local government institutions. The results indicate the establishment of a structured and integrated

labor database, the formulation of medium-term labor projections, and the development of evidence-based labor policies, strategies, and programs. In addition, the activity enhanced the capacity of local government officials to utilize the RTKD as a reference for policy decision-making. Overall, this community service activity demonstrates that data-driven labor planning assistance is effective in strengthening more focused, measurable, and sustainable regional labor governance and has the potential to be replicated in regions with similar characteristics.

Keywords: *Labor System, Community Service, Regional Labor Plan*

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah pada hakikatnya sangat bergantung pada kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola serta mengoptimalkan berbagai sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Dalam kerangka pembangunan ekonomi daerah, sumber daya manusia, khususnya tenaga kerja, menempati posisi strategis sebagai penggerak utama proses produksi sekaligus sebagai penerima manfaat dari pembangunan. Keberadaan tenaga kerja yang berkualitas berkontribusi langsung terhadap peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi wilayah. Berbagai kajian empiris menunjukkan bahwa dinamika kependudukan dan ketenagakerjaan memiliki hubungan yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional (Mukaromah et al., 2024).

Sejalan dengan pendekatan *human development*, pembangunan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai proses memperluas kualitas hidup manusia secara berkelanjutan. *United Nations Development Programme* menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan perlu diukur melalui perluasan kemampuan, pilihan, dan peluang manusia, termasuk dalam bidang kesehatan, pendidikan, serta kapasitas produktif masyarakat. Perspektif ini menempatkan tenaga kerja bukan hanya sebagai faktor produksi, melainkan sebagai pusat dari agenda pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan ketenagakerjaan menjadi instrumen penting dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang.

Secara normatif, pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia berlandaskan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mendefinisikan tenaga kerja sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa. Kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah dapat diidentifikasi melalui sejumlah indikator utama, antara lain jumlah penduduk usia kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan tingkat pengangguran terbuka. Indikator-indikator tersebut berfungsi sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang responsif dan kontekstual. Data empiris yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik menjadi rujukan penting bagi pemerintah daerah dalam memahami kondisi riil ketenagakerjaan masyarakat (Badan Pusat Statistik Kabupaten Seram Bagian Barat, 2024).

Kabupaten Seram Bagian Barat menunjukkan capaian ketenagakerjaan yang relatif positif dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2024 sebagian besar penduduk usia kerja di wilayah ini telah terserap dalam kegiatan ekonomi dengan tingkat pengangguran terbuka yang relatif rendah dibandingkan rata-rata nasional (Badan Pusat Statistik Kabupaten Seram Bagian Barat, 2024). Meskipun demikian, capaian tersebut belum sepenuhnya menjamin keberlanjutan pembangunan ketenagakerjaan. Tanpa perencanaan yang sistematis dan berbasis data, daerah tetap berisiko menghadapi tekanan akibat dinamika demografi, perubahan struktur ekonomi, serta dampak pascapandemi yang memengaruhi pola ketenagakerjaan sektoral (Wiyani & Prihantono, 2023).

Dalam kondisi ideal, pembangunan ketenagakerjaan daerah tidak hanya berorientasi pada penurunan tingkat pengangguran, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kualitas, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja. Ketidakhadiran perencanaan yang terarah berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara persediaan dan kebutuhan tenaga kerja, keterbatasan informasi pasar kerja, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Studi Mering (2021) menegaskan bahwa efektivitas kebijakan pasar kerja sangat dipengaruhi oleh tata kelola yang adaptif dan berbasis data. Selain itu, pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan terbukti berperan penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan tenaga kerja di tingkat nasional maupun daerah (Sutisna, 2022).

Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) Tahun 2025–2029 sebagai instrumen strategis perencanaan ketenagakerjaan daerah. RTKD berfungsi menyediakan informasi ketenagakerjaan yang akurat, menyusun proyeksi persediaan dan kebutuhan tenaga kerja, serta merumuskan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan yang terukur dan berkelanjutan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berfokus pada penguatan sistem ketenagakerjaan daerah melalui pendampingan penyusunan dan implementasi RTKD berbasis data dan proyeksi dengan pendekatan integratif yang juga memperkuat kapasitas pemerintah daerah serta mendorong partisipasi pemangku kepentingan lokal (Hatu et al., 2025). Nilai kebaruan pengabdian ini terletak pada integrasi perencanaan ketenagakerjaan berbasis bukti dengan penguatan tata kelola daerah, sehingga diharapkan mampu mendukung pembangunan ketenagakerjaan yang adaptif dan berkelanjutan di Kabupaten Seram Bagian Barat.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kabupaten Seram Bagian Barat dengan durasi pelaksanaan selama 90 hari kalender. Metode yang digunakan adalah pendampingan perencanaan kebijakan ketenagakerjaan yang bersifat aplikatif dan partisipatif, dengan melibatkan pemerintah daerah sebagai mitra utama. Pendekatan ini dipilih untuk memastikan proses penyusunan dan implementasi Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) Tahun 2025–2029 berjalan sesuai dengan kebutuhan dan konteks daerah. Fokus utama kegiatan diarahkan pada penguatan sistem ketenagakerjaan melalui penyediaan dasar perencanaan yang terstruktur, terukur, dan berbasis data.

Tahapan pelaksanaan diawali dengan pendampingan pengumpulan dan pengolahan data ketenagakerjaan yang bersumber dari data sekunder resmi. Data yang digunakan meliputi penduduk usia kerja, angkatan kerja, kesempatan kerja, serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha. Data tersebut dianalisis untuk menyusun proyeksi persediaan dan kebutuhan tenaga kerja daerah dengan menggunakan pendekatan elastisitas tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi sektor-sektor utama. Analisis dilakukan secara deskriptif dan aplikatif tanpa menyajikan rumus statistik umum, sehingga hasil analisis tetap mudah dipahami dan relevan bagi pengambil kebijakan.

Hasil proyeksi tenaga kerja selanjutnya dimanfaatkan dalam proses pendampingan perumusan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan daerah yang dituangkan dalam dokumen RTKD. Proses ini dilaksanakan melalui konsultasi teknis, diskusi kelompok terarah, serta koordinasi lintas perangkat daerah guna memverifikasi data dan memvalidasi hasil analisis. Selain menghasilkan dokumen perencanaan, kegiatan pendampingan juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam memahami dan menggunakan RTKD sebagai dasar implementasi kebijakan dan program

ketenagakerjaan. Dengan demikian, metode yang diterapkan tidak hanya menghasilkan luaran administratif, tetapi juga memperkuat tata kelola ketenagakerjaan daerah secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Bagian hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menyajikan capaian utama dari proses pendampingan dalam penyusunan dan implementasi Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) Kabupaten Seram Bagian Barat periode 2025–2029. Fokus hasil diarahkan pada penguatan basis data ketenagakerjaan, penyusunan proyeksi tenaga kerja jangka menengah, serta perumusan arah kebijakan dan program ketenagakerjaan daerah yang berbasis pada kondisi riil. Penyajian hasil dilakukan secara sistematis melalui deskripsi naratif yang didukung oleh tabel dan gambar untuk memperjelas informasi yang disampaikan. Setiap tabel dan gambar dirujuk secara eksplisit dalam teks agar keterkaitan antara data dan analisis dapat dipahami secara utuh.

Hasil awal kegiatan pengabdian menunjukkan tersusunnya basis data ketenagakerjaan daerah yang terstruktur dan terintegrasi. Basis data ini mencakup indikator utama ketenagakerjaan, seperti jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, penduduk bekerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan tingkat pengangguran terbuka. Data tersebut menjadi fondasi penting dalam penyusunan analisis dan perencanaan ketenagakerjaan daerah. Ringkasan indikator utama ketenagakerjaan Kabupaten Seram Bagian Barat disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Utama Ketenagakerjaan Kabupaten Seram Bagian Barat

Indikator Ketenagakerjaan	Nilai
Penduduk Usia Kerja (jiwa)	52.177
Angkatan Kerja (jiwa)	49.930
Penduduk Bekerja (jiwa)	48.247
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	95,69
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,38

Berdasarkan Tabel 1, kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Seram Bagian Barat dapat dikategorikan relatif baik, terutama ditunjukkan oleh tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja dan rendahnya tingkat pengangguran terbuka. Capaian ini mencerminkan kemampuan daerah dalam menjaga stabilitas pasar kerja dan penyerapan tenaga kerja. Meskipun demikian, capaian kuantitatif tersebut belum sepenuhnya menjamin keberlanjutan pembangunan ketenagakerjaan di masa mendatang. Oleh karena itu, data ini digunakan sebagai pijakan awal dalam penyusunan proyeksi tenaga kerja dan perumusan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih terarah.

Hasil selanjutnya berupa penyusunan proyeksi persediaan dan kebutuhan tenaga kerja daerah untuk periode 2025–2029. Proyeksi ini disusun menggunakan pendekatan elastisitas tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi sektor-sektor utama yang berkembang di daerah. Tujuan penyusunan proyeksi adalah untuk memberikan gambaran mengenai potensi dinamika

Copyright (c) 2026 COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

 <https://doi.org/10.51878/community.v6i1>

pasar kerja dalam jangka menengah. Hasil proyeksi persediaan dan kebutuhan tenaga kerja Kabupaten Seram Bagian Barat disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Proyeksi Persediaan dan Kebutuhan Tenaga Kerja Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025–2029

Tahun	Persediaan Tenaga Kerja (jiwa)	Kebutuhan Tenaga Kerja (jiwa)
2025	53.420	52.880
2026	54.210	53.760
2027	55.030	54.650
2028	55.890	55.570
2029	56.780	56.520

Berdasarkan Tabel 2, baik persediaan maupun kebutuhan tenaga kerja menunjukkan kecenderungan meningkat selama periode perencanaan. Peningkatan ini sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sektor unggulan daerah. Selisih antara persediaan dan kebutuhan tenaga kerja relatif kecil, yang mengindikasikan perlunya kebijakan penyerapan tenaga kerja yang tepat sasaran. Oleh karena itu, hasil proyeksi ini menjadi dasar penting dalam penyusunan arah kebijakan dan program ketenagakerjaan daerah.

Berdasarkan hasil analisis data ketenagakerjaan dan proyeksi tenaga kerja, kegiatan pengabdian menghasilkan perumusan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan ketenagakerjaan daerah. Proses perumusan kebijakan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai perangkat daerah terkait agar selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. Penyajian kebijakan secara ringkas diperlukan agar dokumen RTKD dapat digunakan secara efektif sebagai acuan pengambilan keputusan. Ringkasan arah kebijakan, strategi, dan program ketenagakerjaan Kabupaten Seram Bagian Barat disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Ringkasan Arah Kebijakan dan Program Ketenagakerjaan Kabupaten Seram Bagian Barat

Arah Kebijakan	Strategi Utama	Program Prioritas
Peningkatan kualitas tenaga kerja	Penguatan pelatihan berbasis kompetensi	Pelatihan vokasi dan sertifikasi
Perluasan kesempatan kerja	Pengembangan sektor unggulan daerah	Program padat karya dan UMKM
Perlindungan tenaga kerja	Penguatan regulasi dan pengawasan	Sosialisasi norma ketenagakerjaan
Penguatan tata kelola ketenagakerjaan	Optimalisasi sistem informasi	Pengembangan database ketenagakerjaan

Berdasarkan Tabel 3, arah kebijakan ketenagakerjaan daerah disusun secara komprehensif dengan memperhatikan keseimbangan antara peningkatan kualitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, dan penguatan tata kelola. Strategi dan program yang dirumuskan bersifat aplikatif dan dapat diimplementasikan oleh perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya. Penyusunan kebijakan berbasis data ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas intervensi pemerintah daerah. Dengan demikian, RTKD berfungsi tidak hanya sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pengambilan keputusan ketenagakerjaan.

Selain luaran berupa dokumen perencanaan, hasil kegiatan pengabdian juga menunjukkan adanya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Peningkatan kapasitas ini tercermin dari keterlibatan aktif perangkat daerah dalam kegiatan koordinasi, konsultasi teknis, dan diskusi kebijakan selama proses pendampingan. Proses pendampingan memberikan pengalaman pembelajaran langsung dalam penerapan perencanaan ketenagakerjaan berbasis data. Dokumentasi kegiatan koordinasi dan konsultasi teknis penyusunan RTKD ditampilkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Teknis Penyusunan RTKD Kabupaten Seram Bagian Barat

Berdasarkan Gambar 1, proses pendampingan dilaksanakan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai perangkat daerah terkait. Keterlibatan lintas sektor ini menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa RTKD dapat diimplementasikan secara terintegrasi. Selain itu, kegiatan tersebut memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menjadikan RTKD sebagai acuan kebijakan ketenagakerjaan. Dengan demikian, hasil pengabdian tidak hanya menghasilkan dokumen perencanaan, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan daerah secara berkelanjutan.

Pembahasa

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada penyusunan dan implementasi Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025–2029 menunjukkan bahwa perencanaan ketenagakerjaan berbasis data merupakan fondasi penting dalam penguatan sistem ketenagakerjaan daerah. Hasil pengabdian ini mengindikasikan bahwa capaian ketenagakerjaan yang relatif baik perlu didukung oleh pengelolaan informasi pasar kerja yang sistematis dan terintegrasi. Keberadaan basis data dan proyeksi tenaga kerja memungkinkan pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih

adaptif terhadap dinamika ekonomi dan demografi. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kebijakan ketenagakerjaan daerah yang dirancang berbasis data empiris memiliki potensi besar dalam meningkatkan produktivitas dan penyerapan tenaga kerja (Muhit et al., 2025).

Penguatan basis data ketenagakerjaan dalam pengabdian ini juga sejalan dengan perkembangan pemanfaatan sistem informasi pasar kerja dalam perumusan kebijakan publik. Studi Giabelli et al. (2022) menunjukkan bahwa sistem informasi ketenagakerjaan berbasis data mampu meningkatkan kualitas analisis pasar kerja dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih presisi. Dalam konteks daerah, ketersediaan data yang terstruktur memungkinkan pemerintah memahami pola permintaan dan penawaran tenaga kerja secara lebih komprehensif. Hal ini relevan dengan temuan Hokoyoku et al. (2024) yang menegaskan bahwa sistem informasi ketenagakerjaan di tingkat daerah berperan strategis dalam mendukung perencanaan dan pelayanan ketenagakerjaan.

Hasil pengabdian juga memperlihatkan bahwa penyusunan proyeksi persediaan dan kebutuhan tenaga kerja berbasis pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran jangka menengah mengenai potensi ketidakseimbangan pasar kerja. Pendekatan ini penting untuk mengantisipasi risiko pengangguran yang dapat muncul meskipun kondisi ketenagakerjaan saat ini relatif stabil. Temuan ini sejalan dengan kajian Trianto (2017) yang menekankan bahwa elastisitas penyerapan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi berbeda antar sektor dan wilayah. Oleh karena itu, perencanaan ketenagakerjaan yang mempertimbangkan proyeksi ekonomi menjadi instrumen strategis dalam menjaga keberlanjutan pembangunan ketenagakerjaan daerah.

Dari perspektif pembangunan berkelanjutan, pengabdian ini menunjukkan bahwa ketenagakerjaan tidak hanya dipahami sebagai isu penyerapan tenaga kerja, tetapi juga sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Afifah dan Abdullah (2024) menegaskan bahwa kebijakan ketenagakerjaan berkelanjutan harus terintegrasi dengan pembangunan ekonomi dan sosial agar mampu memberikan manfaat jangka panjang. Dalam konteks Kabupaten Seram Bagian Barat, RTKD berfungsi sebagai instrumen untuk menyelaraskan kebijakan ketenagakerjaan dengan arah pembangunan daerah. Dengan demikian, perencanaan ketenagakerjaan berbasis data berkontribusi pada pencapaian pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Aspek implementasi kebijakan menjadi perhatian penting dalam pembahasan hasil pengabdian ini. Penyusunan dokumen perencanaan seperti RTKD tidak akan efektif tanpa didukung oleh kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor yang memadai. Hal ini sejalan dengan temuan Triana dan Astuti (2022) yang menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan ketenagakerjaan sangat dipengaruhi oleh komitmen institusi dan kejelasan mekanisme pelaksanaan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi faktor pendukung penting dalam memastikan kebijakan dapat berjalan secara sinergis (Asri & Krisnawansyah, 2022).

Pembahasan ini juga menegaskan pentingnya pendekatan kebijakan berbasis bukti dalam tata kelola ketenagakerjaan daerah. Kebijakan yang dirumuskan berdasarkan data dan analisis empiris cenderung lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Berlian dan Firdaus (2022) menekankan bahwa praktik good governance dapat diperkuat melalui penerapan kebijakan berbasis bukti dalam berbagai sektor publik. Dalam pengabdian ini, pemanfaatan data ketenagakerjaan dan proyeksi tenaga kerja memperkuat posisi RTKD sebagai instrumen kebijakan yang tidak hanya normatif, tetapi juga operasional.

Selain itu, hasil pengabdian menunjukkan bahwa dinamika ketenagakerjaan daerah tidak dapat dilepaskan dari faktor demografi dan pertumbuhan ekonomi. Kajian Ranti et al. (2024) menunjukkan adanya hubungan erat antara pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran di tingkat daerah. Oleh karena itu, perencanaan ketenagakerjaan perlu mempertimbangkan dinamika tersebut secara komprehensif. Di sisi lain, penguatan kualitas tenaga kerja melalui praktik-praktik pengembangan kompetensi juga menjadi faktor pendukung penting dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja daerah (Anisah, 2025). Perspektif advokasi kebijakan yang melibatkan aktor non-pemerintah, sebagaimana dikemukakan oleh Imam dan Tauran (2022), turut memperkaya pendekatan implementasi kebijakan ketenagakerjaan agar lebih partisipatif dan adaptif terhadap kebutuhan lokal.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa penguatan sistem ketenagakerjaan daerah tidak dapat dilepaskan dari kualitas perencanaan dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam mengelola informasi ketenagakerjaan. Hasil pengabdian menegaskan bahwa capaian indikator ketenagakerjaan yang relatif baik perlu ditopang oleh perencanaan yang terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi jangka menengah. Pendampingan penyusunan dan implementasi Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2025–2029 memperlihatkan bahwa integrasi data, proyeksi tenaga kerja, dan koordinasi lintas sektor merupakan prasyarat penting bagi kebijakan ketenagakerjaan yang terarah. Dengan demikian, penguatan sistem ketenagakerjaan daerah menuntut pendekatan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dan berbasis bukti.

Secara substantif, hasil pengabdian ini memaknai bahwa RTKD yang disusun secara partisipatif dan berbasis data mampu menjembatani kesenjangan antara kondisi ideal pembangunan ketenagakerjaan dan praktik kebijakan di tingkat daerah. RTKD berfungsi tidak sekadar sebagai dokumen perencanaan formal, tetapi sebagai instrumen strategis yang mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan konsistensi kebijakan, dan memperkuat sinergi antarperangkat daerah. Kesesuaian antara tujuan pengabdian yang dirumuskan dalam pendahuluan dengan hasil dan pembahasan menunjukkan adanya keterpaduan alur penelitian dan pengabdian. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan pengabdian berhasil memberikan nilai tambah berupa peningkatan kapasitas aparatur serta perubahan pendekatan perencanaan ketenagakerjaan menuju kebijakan berbasis bukti.

Ke depan, hasil pengabdian ini memiliki peluang untuk dikembangkan melalui penguatan implementasi RTKD ke dalam program dan kegiatan sektoral yang lebih operasional. Pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan daerah yang berkelanjutan serta perluasan kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi langkah strategis lanjutan yang perlu didorong. Selain itu, model pendampingan yang diterapkan dalam pengabdian ini berpotensi direplikasi di daerah lain dengan karakteristik yang sejenis. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini dapat menjadi dasar bagi pengabdian lanjutan yang berfokus pada evaluasi implementasi kebijakan ketenagakerjaan dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas serta daya saing tenaga kerja daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, J., & Abdullah, M. N. A. (2024). Kebijakan pemerintah dalam membangun ketenagakerjaan yang berkelanjutan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, dan Budaya Nusantara*, 3(2), 84–92. <https://doi.org/10.55123/sabana.v3i2.3306>
- Anisah, N. (2025). *Optimasi praktik kerja industri: Tantangan dan tingkat efektivitas membangun tenaga kerja berkualitas*. Deepublish. <https://books.google.co.id/books?hl=en&id=gcFKEQAAQBAJ>
- Asri, S., & Krisnawansyah, Y. (2022). Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan*, 1(1), 27–35. <https://doi.org/10.55850/simbol.v1i1.9>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Seram Bagian Barat. (2024). *Kabupaten Seram Bagian Barat dalam angka 2024*. Piru: BPS Kabupaten Seram Bagian Barat. <https://sbbkab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/06a25514da3b9eea5a442e12/kabupaten-seram-bagian-barat-dalam-angka-2024.html>
- Berlian, B., & Firdaus, A. (2022). Good governance melalui kebijakan berbasis bukti reformulasi sistem peradilan pidana nasional. *Jurnal Yuridis*, 9(1), 27–36. <https://doi.org/10.35586/jyur.v9i1.3847>
- Giabelli, A., Malandri, L., Mercurio, F., & Mezzanzanica, M. (2022). GraphLMI: A data driven system for exploring labor market information through graph databases. *Multimedia Tools and Applications*, 81(3), 3061–3090. <https://doi.org/10.1007/s11042-020-09115-x>
- Hatu, R. I. R., Hatu, D. R. R., & Gobel, R. T. S. (2025). Strategi peningkatan pertumbuhan usaha mikro di Kabupaten Boalemo berbasis perencanaan partisipatif. *Journal of Principles Management and Business*, 4(1), 107–119. <https://doi.org/10.55657/jpmb.v4i01.225>
- Hokoyoku, V. R. J., Lahallo, J., & Hasan, P. (2024). Sistem informasi pendataan potensi daerah di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua. *JUTISI: Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 13(1), 464–475. <https://ojs.stmik-banjarbaru.ac.id/index.php/jutisi/article/view/1837>
- Imam, M. F., & Tauran, T. (2022). Advokasi kebijakan ketenagakerjaan (studi kasus IDFOs Indonesia). *Publika*, 1331–1346. <https://doi.org/10.26740/publika.v10n4.p1331-1346>
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2010 tentang perencanaan tenaga kerja makro*. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan RI. <https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/165/peraturan-menteri-nomor-16-tahun-2010>
- Mering, T. (2021). Activation and new governance of labor market policies in Central and Eastern European countries. *Problemy Polityki Społecznej. Social Policy Issues*, 54(3), 31–47. <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=1011180>
- Muhit, A., Evariana, D., & Sofiyah, S. (2025). Pengaruh kebijakan ketenagakerjaan daerah terhadap produktivitas dan penyerapan tenaga kerja di Provinsi Banten. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(2), 843–854. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i2.6319>
- Mukaromah, N., Hasanah, S., Yansyah, F. F., & Noviarita, H. (2024). Kependudukan dan ketenagakerjaan pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Intelek dan*



Cendikiawan Nusantara, 1(6), 9593–9604.
<https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/1763>

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.16/MEN/XI/2010 tentang perencanaan tenaga kerja makro. (2010). *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 542.* <https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/165/peraturan-menteri-nomor-16-tahun-2010>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2007 tentang tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja. (2007). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34.* <https://peraturan.go.id/id/pp-no-15-tahun-2007>

Ranti, L. R., Astrid, A., Yanti, D., & Barella, Y. (2024). Pengaruh pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Kota Pontianak. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial (Jupendis)*, 2(3), 222–235. <https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i3.2032>

Sutisna, M. A. (2022). Sistem informasi pelayanan penyusunan rencana tenaga kerja provinsi/kabupaten/kota berbasis web di Pusat Perencanaan Ketenagakerjaan. *Jurnal Visualika*, 8(2), 33–47.

<https://jurnas.saintekmu.ac.id/index.php/visualika/article/view/18>

Triana, F. U., & Astuti, R. S. (2022). Determinan implementasi kebijakan pemenuhan hak ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(1), 66–82. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/32908>

Trianto, A. (2017). Elastisitas penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Selatan. *Akuisisi: Jurnal Akuntansi*, 13(1).

<https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA/article/view/132>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. (2003). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

United Nations Development Programme. (2019). *Human development report 2019: Beyond income, beyond averages, beyond today*. New York, NY: UNDP. <https://hdr.undp.org/content/human-development-report-2019>

Wiyani, W., & Prihantono, E. Y. (2023). Analisis tenaga kerja sektor pertanian pasca pandemi Covid-19 di Kabupaten Jombang. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 10(1), 87–96. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jbm/article/view/10588>